Jurnal Perempuan
untuk pencerahan dan kesetaraan
Vol. 22 No. 4, November 2017
p-ISSN 1410-153X
e-ISSN 2541-2191
95

Perempuan Nelayan

Catatan Jurnal Perempuan
Perempuan Nelayan

Artikel

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina

Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan
Naufaludin Ismail

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina
Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling

Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjaringan
Endah Kusuma Wardhani

Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara
Yekti Wahyuni

Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung
Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara
Dedi Adhuri: Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif
Abby Gina

Kata Makna
Nur Iman Subono

Profil
Masnuah, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan
Andy Misbahul Pratiwi

Resensi Buku
Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak
Naufaludin Ismail

Diterbitkan oleh:

YAYASAN YJP JURNAL PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Jurnal Perempuan
untuk pencerahan dan kesetaraan

Vol. 22 No. 4, November 2017

ISSN 1410-153X

PENDIRI
Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA
Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI
Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI
Atnike Nova Sigiro, M.Sc. (Human Rights Diplomacy, Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI
Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA
Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI
Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN
Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK
Elisabet Dwi

ALAMAT REDAKSI :
Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:
indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2017

FORDFOUNDATION

Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan 95

Perempuan Nelayan
Fisherwomen

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Nelayan / *Fisherwomen* iii

Artikel / *Articles*

- Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias / *The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation* 295-309
  Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina
- Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan / *Struggle of Legal Identity Recognition of Fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik: Feminist Analysis toward Regulation on Fishermen Card and Insurance* 311-321
  Naufaludin Ismail
- Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina / *Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines* 323-331
  Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling
- Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjaringan / *Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium and Kamal Muara Village, Penjaringan* 333-344
  Endah Kusuma Wardhani
- Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara / *Productive, Reproductive and Community Roles of Women Who Process Green Shells in Muara Angke, North Jakarta* 345-357
  Yekti Wahyuni
- Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung / *Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung* 359-368
  Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara / *Interview*

Dedi Adhuri: Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif / *Dedi Adhuri: Marginalization of Fisherwomen is Cultural Product and Discriminatory Policy* 369-374
Abby Gina

Kata Makna / *Words and Meaning*

Nur Iman Subono 375-376

Profil / *Profile*

Masnuah, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan / *Masnuah, Fisherwomen Rights Defender* *377-383*
Andy Misbahul Pratiwi

Resensi Buku / *Book Review*

Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak / *When Development Disregards Women's and Children's Rights* 385-388
Naufaludin Ismail

Perempuan Nelayan
Fisherwomen

"Poros Maritim" dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya. Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo (CNN Indonesia 2017). Masalah perikanan memang masalah penting sebab sedikitnya 200 juta orang bekerja sebagai nelayan tradisional terutama di negara-negara dunia berkembang. Peran mereka sangat besar sebab 70 persen kontribusi produksi perikanan dunia berasal dari mereka. Di tahun 2010 diperkirakan manusia mengonsumsi 128 juta ton ikan dan di dalam satu dekade terakhir ikan dikonsumsi 4,3 miliar orang. Di tahun 2021 diperkirakan 172 juta orang akan mengonsumsi ikan dan industri ini akan menjadi industri yang paling cepat berkembang (FAO 2012).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. Mereka kadang tidak menerima upah di dalam bisnis rumah tangga. Bila pun mereka menangkap ikan di laut mereka dianggap hanya menemani suami. Definisi nelayan inilah yang membuat perempuan tidak diperhitungkan di sektor perikanan. Kontribusi perempuan nelayan dianggap tidak ada dan ini berdampak buruk terhadap perempuan nelayan karena tidak bisa mendapatkan akses kredit, teknologi pengolahan, fasilitas gudang pendinginan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Kabar Bahari edisi 18 November-Desember 2015).

Panduan Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil (*Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries*) dalam konteks keamanan pangan dan penghapusan kemiskinan menyebutkan secara tegas kewajiban negara untuk memperlakukan perempuan nelayan termasuk pembudidaya dan petambak garam secara istimewa dan hak-haknya dijamin. Jaminan tersebut antara lain mendapatkan perumahan yang layak, sanitasi dasar yang aman dan higienis, tabungan investasi dan kredit, bebas dari pelecehan seksual dan kekerasan, pengembangan teknologi, dan sebagainya, dengan merujuk kepada CEDAW. Bila perempuan nelayan tidak dijamin hak-haknya dan tidak didukung keberadaannya maka dapat diperkirakan bahwa kelompok miskin terbesar tentu datang dari golongan ini. Itu sebabnya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada perempuan nelayan dan mengubah definisi nelayan yang sangat maskulin. Bila hal ini tidak dilakukan maka pencapaian SDGs dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan gagal terutama komponen esensial seperti pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesinambungan pembangunan dari perikanan dan sumber daya laut.

Oleh sebab itu, analisis gender dalam soal perikanan dan sumber daya laut menjadi penting agar produktivitas dan keadilan terhadap perempuan terjamin. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan advokasi mengenai kesetaraan gender, membentuk "*champions*" (yang dapat memajukan hak-hak perempuan nelayan), kerja sama dengan peneliti dan para ahli kebijakan. Koalisi besar ini dibutuhkan antara LSM, pemerintah, peneliti dan akademisi. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa lensa gender dibutuhkan dalam memformulasi kebijakan perikanan yang menitikberatkan pada hak-hak perempuan. Selama ini perspektif gender dalam isu perikanan sangat lemah karena hanya fokus pada produksi ikan yang dikuasai oleh laki-laki. Selain itu, peranan perempuan nelayan harus masuk ke dalam semua instrumen internasional maupun nasional (Alami & Raharjo 2017).

Menyadari pentingnya peran dan kontribusi perempuan nelayan bagi perekonomian keluarga dan masyarakat, Jurnal Perempuan mengadakan riset di tiga wilayah yakni Dipasena, Demak dan Gresik untuk mengungkap tantangan, strategi dan upaya yang dilakukan perempuan nelayan guna mendapat pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Langkah kami mendokumentasikan pengalaman dan suara perempuan nelayan dapat terwujud berkat kerja sama dengan Kiara, PPNI, P3UW dan Puspita Bahari. Hasil riset selain kami dokumentasikan dalam JP edisi ini juga kami narasikan dalam bentuk film dokumenter. Edisi ini diharapkan dapat mendorong adanya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan dengan membuka akses bagi perempuan nelayan untuk mendapatkan kartu nelayan. Begitu juga dengan keberadaan film dokumenter, diharapkan dapat bermanfaat bagi proses advokasi perempuan nelayan di Indonesia. (**Anita Dhewy**)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias

The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 295-309, 3 tabel, 10 daftar pustaka

This research was conducted in Morodemak and Purworejo Village, Demak District, Central Java Province, Indonesia, by focusing on the problem faced by fisherwomen—who go to sea as well as who process the catches—and the activism of Puspita Bahari (fisherwomen organization in Demak). This research seeks to show that women have contributed to the economic progress of coastal communities. This research became a personal research because the researchers have the opportunity to observe the activity of fisherwomen who go to sea and also in the research process, the researchers participated in the advocacy process to get recognition as fisherwomen. By using Naila Kabeer gender analysis, this research found that the complexity of the problems faced by fisherwomen are layers ranging from family, community, market until state levels. The issues of the division of labor, the biased bureaucracy and domestic violence are the three main topics that studied in this paper. Recognition of the identity of fisherwomen becomes an urgency and first step that should be realized in order to improve fisherwomen condition.

Keywords: exisistence of fisherwomen, fisherwomen, morodemak, purworejo, tambak polo, domestic violence.

Penelitian ini dilakukan di Desa Morodemak dan Desa Purworejo dengan memfokuskan pada persoalan yang dihadapi oleh perempuan nelayan—yang melaut maupun yang mengolah hasil tangkapan—dan aktivisme Puspita Bahari. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menjadi penelitian yang personal karena penulis berkesempatan melakukan observasi langsung terhadap aktivitas perempuan nelayan yang melaut dan juga karena dalam perjalanannya peneliti ikut dalam perjuangan perempuan nelayan untuk mendapatkan pengakuan sebagai nelayan. Dengan menggunakan analisis gender Naila Kabeer penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan nelayan berlapis-lapis mulai dari level keluarga, masyarakat, komunitas dan pasar. Persoalan pembagian kerja, birokrasi yang bias serta kekerasan dalam rumah tangga adalah tiga topik utama yang dikaji dalam tulisan ini. Pengakuan terhadap identitas perempuan nelayan menjadi urgensi dan langkah awal yang harus diwujudkan guna memperbaiki kondisi perempuan nelayan.

Kata kunci: eksistensi perempuan nelayan, perempuan melaut, morodemak, purworejo, tambak polo, KDRT perempuan nelayan.

Naufaludin Ismail (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan

Struggle of Legal Identity Recognition of Fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik: Feminist Analysis toward Regulation on Fishermen Card and Insurance

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 311-321, 2 tabel, 10 daftar pustaka

This paper will focus on feminist analysis of Law No. 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers and Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 16 of 2016 as the legal basis for policy on Fishermen Card and Insurance. This paper will also analyze the experiences of two fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik, East Java who successfully obtained legal identity in the form of fisher card and insurance as a form of legitimacy and recognition of their identity as fisherwomen. The strong patriarchal culture in various society layers, caused the recognition of the political identity of fisherwomen has become difficult, so a feminist analysis toward policy on fisher card and insurance is needed so that women can engage as active subjects in the policy.

Keywords: fisherwomen, patriarchy, sexism, legal identity, feminist policy

Tulisan ini akan berfokus pada analisis feminis pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 sebagai landasan hukum untuk kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan. Tulisan ini juga akan menganalisis pengalaman dua perempuan nelayan di Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur yang berhasil mendapatkan akses identitas hukum berupa kartu dan asuransi nelayan sebagai bentuk legitimasi dan rekognisi identitas politik mereka sebagai perempuan nelayan. Kuatnya budaya patriarki di berbagai lapisan sosial-masyarakat menyebabkan pengakuan atas identitas hukum perempuan nelayan menjadi sulit untuk direkognisi, sehingga diperlukan sebuah analisis feminis atas kebijakan kartu dan asuransi nelayan agar perempuan bisa terlibat sebagai subjek aktif di dalam kebijakan tersebut.

Kata Kunci: perempuan nelayan, patriarki, seksisme, identitas hukum, kebijakan feminis

Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling (College of Social Work and Community Development University of the Philippines – Diliman, Metro Manila, Filipina)

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina

Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 323-331, 1 tabel, 7 daftar pustaka

This paper is a synthesis of the results of the case studies on women's situation in fisheries done by the members of the SEA Fish for Justice Network. The network is composed of 15 non-government and fishers organizations from the Southeast Asia region. It envisions equity in access to and control over off-shore, coastal and inland aquatic natural resources including the termination of suffering caused by unsustainable resources and/or privatized control over communal resources. The case

studies were conducted by SEAFish Network members in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines in the second and third quarter of 2008 to highlight the roles, issues and challenges faced by women in coastal communities as well as the spaces provided them to facilitate their empowerment. The network members who conducted the studies were FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) and PROCESS-Bohol, CERD, and Tambuyog Development Center (CERD).

Keywords: women roles, women's participation, division of labor

Artikel ini merupakan sintesis dari hasil studi kasus pada perempuan dalam industri perikanan yang dilakukan oleh anggota SEA FISH for Justice Network. Jaringan ini terdiri dari 15 organisasi nonpemerintah dan nelayan dari kawasan Asia Tenggara. Jaringan ini mengupayakan keadilan dalam akses dan kontrol atas sumber daya alam lepas pantai, pesisir dan darat, termasuk penghentian krisis yang disebabkan oleh sumber daya yang tidak berkelanjutan dan/atau privatisasi atas kontrol sumber daya yang bersifat publik. Penelitian dilakukan oleh anggota SEAFish Network di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2008 untuk menyoroti peran, isu dan tantangan yang dihadapi perempuan di masyarakat pesisir, serta ketersediaan ruang untuk mempermudah usaha pemberdayaan perempuan. Anggota jaringan yang melakukan penelitian adalah FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) dan PROCESS-Bohol, CERD, dan Tambuyog Development Center (CERD).

Kata kunci: peran perempuan, partisipasi perempuan, pembagian kerja

---

Endah Kusuma Wardhani (Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, Indonesia)

Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjaringan

Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium and Kamal Muara Village, Penjaringan

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 333-344, 13 daftar pustaka

It has been more than ten years since The Jakarta Bay reclamation project displaced fishermen from the sea where they were normally fishing. The direct impact of reclamation on fisherwomen was income decrease, because it has damaged the marine ecosystems due to the effects of sucking and backfilling of the sea sand. In addition, there will be at least 16,998 of fishermen households will be evicted from the coastal areas of Jakarta, Banten and Bekasi due to this reclamation. The findings of this study are: the reclamation made the fisherwomen become poorer, their burden is higher and they have experienced double marginalization. The research methodology is a qualitative study with feminist perspective. Data collection are by in-depth interview with ten fisherwomen, document study, and fields observation. Selection of research sites is purposive, namely Kampung Akuarium dan Kampung Kamal Muara, District of Penjaringan, North Jakarta Municipality. In particular, this study wants to bring up the voices of poor fisherwomen as marginalized group of people, who have not been heard. It is hoped they will be brave and voiced their rights and aspirations openly which they have not dared to do so.

Keywords: fisherwomen, Jakarta Bay reclamation, marginalization, fisherwomen impoverishment

Proyek reklamasi Teluk Jakarta setidaknya telah lebih dari sepuluh tahun menggusur para nelayan dari wilayah perairan yang merupakan sumber penghidupan mereka. Dampak reklamasi secara langsung pada perempuan nelayan adalah penurunan pendapatan karena ekosistem laut sedemikian rupa hancur akibat penghisapan dan pengurukan pasir laut. Selain itu, setidaknya terdapat 16.998 rumah tangga nelayan akan tergusur dari wilayah pesisir Jakarta, Banten dan Bekasi akibat proyek reklamasi ini. Temuan dari penelitian ini adalah tenjadinya penurunan pendapatan, beban kerja perempuan nelayan yang makin besar, dan makin termarginalisasinya para perempuan nelayan. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif berperspektif feminis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada sepuluh perempuan nelayan, studi dokumen, dan observasi di lapangan. Pemilihan lokasi penelitian bersifat purposif, yaitu di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Secara khusus, penelitian ini ingin memunculkan suara-suara perempuan nelayan miskin sebagai kaum marginal perkotaan, yang selama ini tidak terdengar. Diharapkan mereka kemudian berani bersikap dan menyuarakan hak dan aspirasi secara terbuka yang selama ini belum berani mereka lakukan.

Kata kunci: perempuan nelayan, reklamasi Teluk Jakarta, marginalisasi perempuan nelayan, pemiskinan perempuan nelayan

---

Yekti Wahyuni (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Indonesia)

Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara

Productive, Reproductive and Community Roles of Women Who Process Green Shells in Muara Angke, North Jakarta

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 345-357, 2 gambar, 1 tabel, 13 daftar pustaka

This study aims to find out the productive, reproductive and community roles of fisherwomen in Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta. The subjects of the study were two fisherwomen who work in the processing of green shells, as owners and as shell-peeler laborer. The study explores women's experience as breadwinners in the marine sector including the experience as a catch fisherwomen. The results showed that the role of fisherwomen in the productive and improvement of the family economy is very real, either directly or indirectly as a fisherwomen or processor of marine products. Three roles of fisherwomen in Muara Angke, sub-district Penjaringan, North Jakarta namely productive, reproductive, and social community. The fisherwomen took part in supplementing family income. In addition to performing reproductive roles related to domestic work, fisherwomen also have an active social role in social movements in order to maintain their living spaces and their spheres. The study found the tendency of women to abandon the role of capture fisherwomen when carrying out the role of biological reproduction.

Keywords: fisherwomen, economic roles, social roles, production roles, reproductive roles, social community roles

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran produksi, reproduksi dan sosial kemasyarakatan perempuan nelayan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Subjek penelitian adalah dua orang perempuan nelayan yang bekerja di bidang pengolahan kerang hijau, sebagai pemilik dan sebagai buruh pengupas kerang. Penelitian menggali pengalaman perempuan sebagai pencari nafkah di sektor kelautan termasuk pengalaman sebagai nelayan tangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan nelayan dalam produksi dan peningkatan ekonomi keluarga sangatlah nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai nelayan maupun pengolah hasil laut. Tiga peran perempuan nelayan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yakni produksi, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan. Perempuan nelayan ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga. Selain menjalankan peran reproduksi yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, perempuan nelayan juga memiliki peran sosial kemasyarakatan dengan aktif dalam gerakan sosial dalam upaya mempertahankan ruang hidup dan ruang kelolanya. Penelitian menemukan kecenderungan perempuan meninggalkan

peran sebagai nelayan tangkap ketika menjalankan peran reproduksi biologis.

Kata kunci: perempuan nelayan, peran ekonomi, peran sosial, peran produksi, peran reproduksi, peran sosial kemasyarakatan

---

Gadis Arivia & Abby Gina (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung

Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 359-368, 4 tabel, 5 daftar pustaka

This study examines the role of women prawn farmers in Dipasena, East Rawajitu District, Tulang Bawang, Lampung and what it means for human development in Indonesia. Several focus group discussions and indepth interviews with women prawn farmers and fishermen community were conducted to collect data and understand comprehensively the issues that women prawn farmers face in a patriarchal culture where they are not acknowledged as women workers. This paper uses a feminist perspective on women and work and Martha Nussbaum's capability categories. This paper concludes that women's roles and contribution in fishery and in national development is not recognized and not accommodated in national and local policies. Women's role in fishery industry is considered non-existent in this society and therefore restrict their potential and meaningful existence and respect on equal human dignity.

Keywords: women prawn farmers, capabilities, human dignity, development, Martha Nussbaum

Penelitian ini melihat peran perempuan petambak udang di Dipasena, Kabupaten Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung dan melihat apa dampaknya pada pembangunan manusia di Indonesia. Beberapa diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam dengan para petambak perempuan dan komunitas nelayan dilakukan untuk pengumpulan data guna memahami secara komprehensif persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan petambak di dalam masyarakat patriarki, di mana mereka tidak diakui sebagai petambak perempuan. Tulisan ini menggunakan perspektif feminis tentang perempuan dan kerja dan pendekatan kapabilitas dari Martha Nussbaum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa peran dan kontribusi perempuan dalam perikanan dan pembangunan nasional tidak diakui dan tidak diakomodasi dalam kebijakan nasional dan daerah. Peran perempuan dalam industri perikanan tidak diakui dalam masyarakat sehingga membatasi eksistensi mereka yang potensial dan bermakna serta membatasi penghargaan atas kesetaraan manusia.

Kata Kunci: perempuan petambak udang, kapabilitas, kemartabatan manusia, pembangunan, Martha Nussbaum

Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, 333-344 DDC: 305

Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjaringan

Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium and Kamal Muara Village, Penjaringan

Endah Kusuma Wardhani

Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia
Gedung Rektorat Lt. IV, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430, Indonesia

endah_kwardhani@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 11 September 2017, direvisi 19 September 2017, diputuskan diterima 9 Oktober 2017

Abstract

It has been more than ten years since The Jakarta Bay reclamation project displaced fishermen from the sea where they were normally fishing. The direct impact of reclamation on fisherwomen was income decrease, because it has damaged the marine ecosystems due to the effects of sucking and backfilling of the sea sand. In addition, there will be at least 16,998 of fishermen households will be evicted from the coastal areas of Jakarta, Banten and Bekasi due to this reclamation. The findings of this study are: the reclamation made the fisherwomen become poorer, their burden is higher and they have experienced double marginalization. The research methodology is a qualitative study with feminist perspective. Data collection are by in-depth interview with ten fisherwomen, document study, and fields observation. Selection of research sites is purposive, namely Kampung Akuarium dan Kampung Kamal Muara, District of Penjaringan, North Jakarta Municipality. In particular, this study wants to bring up the voices of poor fisherwomen as marginalized group of people, who have not been heard. It is hoped they will be brave and voiced their rights and aspirations openly which they have not dared to do so.

Keywords: fisherwomen, Jakarta Bay reclamation, marginalization, fisherwomen impoverishment

Abstrak

Proyek reklamasi Teluk Jakarta setidaknya telah lebih dari sepuluh tahun menggusur para nelayan dari wilayah perairan yang merupakan sumber penghidupan mereka. Dampak reklamasi secara langsung pada perempuan nelayan adalah penurunan pendapatan karena ekosistem laut sedemikian rupa hancur akibat penghisapan dan pengurukan pasir laut. Selain itu, setidaknya terdapat 16.998 rumah tangga nelayan akan tergusur dari wilayah pesisir Jakarta, Banten dan Bekasi akibat proyek reklamasi ini. Temuan dari penelitian ini adalah tenjadinya penurunan pendapatan, beban kerja perempuan nelayan yang makin besar, dan makin termarginalisasinya para perempuan nelayan. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif berperspektif feminis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada sepuluh perempuan nelayan, studi dokumen, dan observasi di lapangan. Pemilihan lokasi penelitian bersifat purposif, yaitu di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Secara khusus, penelitian ini ingin memunculkan suara-suara perempuan nelayan miskin sebagai kaum marginal perkotaan, yang selama ini tidak terdengar. Diharapkan mereka kemudian berani bersikap dan menyuarakan hak dan aspirasi secara terbuka yang selama ini belum berani mereka lakukan.

Kata kunci: perempuan nelayan, reklamasi Teluk Jakarta, marginalisasi perempuan nelayan, pemiskinan perempuan nelayan

Pendahuluan

Pembangunan seringkali luput untuk melihat dampaknya pada perempuan. Kisah para perempuan Rembang melawan pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah adalah perjuangan perempuan untuk mempertahankan lingkungan mereka dari kerusakan alam dan potensi hilangnya sumber air yang ratusan tahun menghidupi mereka. Hal tersebut paling tidak memperjelas fakta adanya ketimpangan gender yang terjadi pada sebuah proses pembangunan. Begitu pula pada fenomena terkini yang menjadi polemik masyarakat yaitu pembangunan mega proyek reklamasi Teluk Jakarta yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 (Indonesia Investments n.d.). Proyek tersebut akan mengubah setidaknya 5,100 hektar wilayah lautan menjadi daratan baru di wilayah Teluk Jakarta (Indonesia Investments n.d.).

Seperti juga penolakan para perempuan Rembang pada kampanye bahwa pembangunan pabrik semen akan berdampak positif pada pengadaan lapangan pekerjaan di Rembang, para perempuan nelayan Teluk

Jakarta menolak kampanye bahwa air laut di Teluk Jakarta telah sangat tercemar sebagai alasan pengurukan wilayah laut untuk pembangunan pulau-pulau baru di Teluk Jakarta. Mereka memang mengamati bahwa beberapa pabrik di sekitar pesisir Jakarta ada yang secara rutin membuang limbah mereka begitu saja ke sungai-sungai yang akhirnya mengalir ke laut dan membuat laut tercemar, terutama di musim penghujan. Alih-alih pabrik-pabrik penghasil limbah ditertibkan, malah masyarakat nelayan yang harus merasakan kehilangan mata pencahariannya dari mencari ikan. Menurut para nelayan, sebelum reklamasi di mulai sebetulnya hasil ikan dan hasil laut lainnya di Teluk Jakarta sangat mencukupi untuk kehidupan mereka.

Reklamasi Teluk Jakarta adalah proyek pembangunan pulau-pulau baru dengan cara menguruk wilayah laut di Teluk Jakarta. Proyek ini merupakan bagian dari Rencana Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development, NCICD). Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan karena penduduk Jakarta semakin padat dan diharapkan rangkaian pulau-pulau ini dapat menampung dua juta penduduk. Masterplan NCICD adalah sebuah proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Belanda, studi-studi kelayakan sebelumnya dibiayai oleh pemerintah Belanda. NCICD juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan banjir di Jakarta. Sayangnya saya melihat proyek ini luput melihat masyarakat nelayan, terlebih lagi perempuan nelayan, yang sangat terdampak dengan pencemaran laut karena kegiatan pembangunan tersebut.

Jika kita berkunjung ke wilayah-wilayah perkampungan nelayan di pesisir Teluk Jakarta, kita akan melihat wilayah yang seolah-olah tidak tersentuh pembangunan. Lingkungan kumuh, rumah-rumah dibangun seadanya, jalan rusak, dan air bersih sulit diperoleh. Pembangunan di perkotaan seolah-olah tidak melihat masyarakat nelayan. Ketika wilayah itu dibangun, tidak jarang para nelayan kemudian dipinggirkan sehingga para perempuan nelayan akhirnya harus merasakan marginalisasi berlapis. Mengapa berlapis? Di dalam masyarakat perkotaan seperti Jakarta, para nelayan menempati status yang rendah, seringkali dianggap pekerja rendah dan suaranya tidak didengar. Sementara di dalam masyarakat nelayan sendiri, perempuan seringkali tidak terlihat. Nelayan lebih sering dianggap sebagai yang memiliki entitas laki-laki, sehingga seringkali program-program pemerintah umumnya hanya menyentuh kaum laki-laki saja. Padahal bila kita turun melihat kehidupan kampung nelayan, kita dapat melihat bahwa kerja-kerja perempuan nelayan adalah kerja-kerja yang mendominasi. Meskipun demikian, seringkali masih terjadi stereotip sekaligus mekanisme pemisahan kerja berdasarkan gender, kerja-kerja dengan waktu panjang dan tenaga murah didominasi oleh perempuan nelayan.

Peran perempuan dalam keluarga nelayan sangatlah dominan dalam menentukan kelangsungan kehidupan keluarga nelayan. Dalam posisi tanggung jawab sosial ekonomi, perempuan dan laki-laki berposisi sejajar (Kusnadi 2003, h. 7). Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat bahwa rumah tangga nelayan sangat kental diwarnai dengan beban ganda pada perempuan sebagai pekerja produktif dan reproduktif dalam keluarga masyarakat nelayan. Suburnya stereotip yang menganggap bahwa pekerjaan domestik dan reproduksi adalah pekerjaan perempuan membuat mereka menanggung beban kerja yang lebih berat dari sebelumnya. Menurut studi Kiara (2015), mayoritas perempuan nelayan bekerja dengan jam kerja yang panjang yaitu 15 hingga 17 jam sehari. Maka fenomena menurunnya penghasilan masyarakat nelayan sebagai dampak reklamasi ini akhirnya berimplikasi pada beban kerja perempuan yang semakin besar dan jam kerja yang semakin panjang untuk menambal berbagai kebutuhan konsumsi, seperti pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan.

Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi reklamasi Teluk Jakarta terhadap kehidupan perempuan nelayan? Sementara pertanyaan turunannya adalah bagaimana reklamasi berdampak pada beban kerja perempuan nelayan? Bagaimana strategi perempuan nelayan menanggulangi berbagai permasalahan yang timbul terkait dampak reklamasi? Metodologi penelitian ini adalah kualitatif dengan perspektif feminis. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada sepuluh orang perempuan nelayan sebagai subjek utama, dan sepuluh orang lainnya sebagai subjek pendukung, yaitu para suami, anak, dan pemuka masyarakat setempat. Studi dokumen dan observasi lapangan juga dilakukan untuk memperkaya informasi pada penelitian ini.

Pemiskinan Perempuan Nelayan

Menurut David Mosse (2010), kondisi kemiskinan sebuah kelompok masyarakat seringkali terjadi karena persimpangan berbagai macam sebab dan bukanlah sekadar bersumber dari faktor internal masyarakat itu

sendiri. Faktor-faktor eksternal seperti ketidakberpihakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pembuat kebijakan yang disebut Mosse sebagai pendekatan relasi, lebih sering menjadi penyebab langgengnya kemiskinan masyarakat tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada masyarakat nelayan Teluk Jakarta yang kehidupannya relatif tertinggal dari masyarakat Kota Jakarta pada umumnya. Kebijakan pemerintah belum berpihak kepada mereka sehingga masih banyak daerah kampung nelayan yang tidak memiliki ketersediaan air bersih atau pun fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Ketika terjadi proyek pembangunan yang menyentuh wilayah mereka, seringkali malah para nelayan lah yang dipinggirkan. Maka persimpangan yang menyebabkan ketidaksetaraan pada perempuan nelayan adalah mereka miskin, mereka adalah nelayan yang seringkali tidak terwakili, dan mereka perempuan.

Saya melakukan wawancara dengan sepuluh perempuan nelayan dengan status sosial ekonomi yang berbeda-beda untuk melihat apakah reklamasi berdampak negatif pada seluruh tingkatan status. Mereka berprofesi sebagai pengepul ikan, pembuat ikan asin, lima nelayan yang dahulu memiliki bagan-bagan kerang, sementara hanya dua diantaranya yang masih memilikinya, dan tiga orang lainnya telah beralih profesi menjadi buruh nelayan. Sepuluh subjek pendukung juga saya wawancarai yaitu para suami, anak, dan pemuka masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai implikasi reklamasi terhadap perempuan nelayan di pesisir Teluk Jakarta ini.

Berbincang-bincang dengan seorang perempuan nelayan, Nani, nama samaran (2017, wawancara 25 Februari), di Kampung Akuarium seperti berbicara dengan perempuan nelayan pekerja keras pada umumnya. Kisah Nani (56 tahun) adalah kisah panjang mengenai perjuangan hidupnya setelah Teluk Jakarta direklamasi. Sejak akhir tahun 2015, ia dan suaminya kehilangan sumber pendapatan dari menangkap ikan dan pengepul ikan. Beberapa bulan setelah itu, tempat tinggalnya di Kampung Akuarium juga digusur dan ia dipaksa untuk memilih pada pilihan-pilihan yang sama sulitnya untuk kehidupan keluarganya. Proyek reklamasi Teluk Jakarta datang begitu saja dan merusak semua tatanan hidup bermasyarakat yang selama ini ia geluti. Narasi serupa diungkapkan suaminya, Sukri (2017, wawancara 25 Mei) yang pertama kali mengetahui proyek itu ketika melihat laut tempatnya menjaring selama ini (lokasi Pulau G sekarang berdiri), tiba-tiba ditimbun pasir-pasir laut dan ia diusir tanpa tahu ihwal cerita proyek pembangunan tersebut. Ia juga tidak tahu mengapa para nelayan yang telah berpuluh-puluh tahun mencari penghidupan di situ harus menyingkir secara tiba-tiba. Apa yang ia mengerti adalah proyek tersebut hanya menyisakan laut yang tercemar sehingga para nelayan harus mengalami penurunan penghasilan yang signifikan, bahkan kehilangan sumber penghidupannya.

Sukri kemudian harus melaut ke Kepulauan Seribu untuk mencari ikan, tetapi rupanya pencemaran air laut karena reklamasi telah mencapai wilayah kepulauan itu sehingga ikan-ikan pun tidak lagi mendekat. Pendapatan Sukri pun terus menurun. Dengan modal sebesar seratus hingga dua ratus ribu rupiah untuk melaut, tidak jarang ia harus merugi karena hasil yang diperoleh hanya beberapa kilogram saja dan tidak dapat mencukupi kehidupan keluarganya. Untuk melaut lebih jauh ke daerah Banten dan Sumatra yang masih subur dengan ikan, Sukri tidak lagi sanggup karena hal itu membutuhkan tenaga dan biaya yang tinggi. Kejadian tersebut berulang selama beberapa waktu dan Sukri tidak lagi dapat menghasilkan uang dari pekerjaannya sebagai nelayan, oleh karena itu Nani meminta suaminya untuk berhenti saja melaut. Padahal sebelumnya, hidup mereka sebagai nelayan sangat berkecukupan.

Selain mewawancarai Nani dan suaminya, saya juga mewawancarai anak mereka, Tia sebagai subjek pendukung dalam penelitian saya. Nani adalah potret perempuan serba bisa di mata Tia. Menurut Tia, ibunya adalah sosok perempuan kreatif yang tak pernah berhenti bekerja. Ikan-ikan itu dipasarkannya sendiri, dan bila tidak habis terjual, ia mengolahnya sendiri menjadi ikan asin. Banyaknya pekerjaan produktif yang digeluti Nani, tidak membuat ibunya melupakan pekerjaan-pekerjaan domestiknya. Di pagi hari, Nani mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, dari memasak, membersihkan rumah dan mempersiapkan anak-anaknya sekolah. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestiknya, Nani melayani para nelayan yang menyetorkan ikan padanya sambil ia mengolah ikan asin. Sebelum siang hari, ia menjajakan ikan di Kampung Luar Batang yang bersebelahan dengan Kampung Akuarium. Setelah itu, sambil berjalan pulang ke rumahnya, ia berbelanja sayuran di pasar sambil memulung botol-botol plastik. Karena penghasilannya terus menurun, ia pun harus rela bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. "Lumayan…, dari memulung ini saya bisa dapat tiga puluh ribu seminggu", kata Nani kepada saya sambil tertawa. Keadaan mereka sekarang memaksa Nani untuk mencari uang dengan cara apapun. Menurut Tia, sebelum reklamasi penghasilan orang tuanya bisa mencapai Rp600.000,00 per hari dari penjualan ikan segar saja.

Sosok Nani cukup dikenal baik oleh penduduk setempat, maupun para peziarah yang biasa mengunjungi Masjid Luar Batang. Untuk membeli oleh-oleh ikan asin, mereka seringkali singgah di lapak Nani yang sekarang telah rata dengan tanah. Nasib mereka memang malang, setelah beberapa saat penghasilan mereka tergerus karena reklamasi, rumah-rumah mereka yang berada di muara sungai Pasar Ikan pun harus digusur. Penggusuran pada April 2016, telah meluluhlantakkan kehidupan mereka. Rumah dan tempat-tempat usaha yang mereka bangun telah rata dengan tanah dan para nelayan harus bersedia direlokasi ke rumah-rumah susun (rusun) yang jaraknya sekitar 30 kilometer dari lokasi mereka mencari ikan sebelumnya.

Nani tidak bersedia direlokasi karena setelah ia melakukan survei di Rusun Marunda, lokasi tersebut terlalu jauh dari tempat mereka berusaha sebagai nelayan. Jauh dari pantai berarti mereka tak dapat menjaga perahu-perahu agar tidak tenggelam atau dicuri. Selain itu, di rusun tersebut juga tak ada tempat bagi dirinya untuk memproduksi ikan asin. Oleh karena itu ia tetap memilih untuk hidup di lokasi bekas penggusuran demi mempertahankan sumber penghidupannya. Nani hanya dapat menerima nasibnya dengan sabar karena dalam kamusnya, sabar adalah kata kunci untuk bertahan. Sabar adalah resistensinya untuk dapat terus mempertahankan kehidupan dan pekerjaannya sebagai perempuan nelayan yang mungkin eksistensinya tidak diakui dalam ingar-bingar pembangunan sebuah megapolitan, tempat ia hidup selama dua puluh lima tahun di dalamnya.

Nani tidak sendiri, sedikitnya terdapat 16.855 rumah tangga nelayan (Kiara dikutip dalam Arif 2014) masih bertahan hidup di sepanjang pesisir Teluk Jakarta meskipun dengan kondisi sumber penghidupannya semakin hilang. Di rumah-rumah kumuh mereka tinggal sementara pendapatan mereka sebagai nelayan pun semakin tergerus. Akan tetapi sebagai nelayan, mereka masih terus berharap bahwa laut akan kembali subur seperti masa sebelum reklamasi dilakukan. Mereka tidak berharap lain selain dapat mempertahankan kehidupan mereka sebagai nelayan. Pada akhirnya para perempuan seperti Nanilah yang harus merasakan beban ganda dari kehilangan sumber pendapatan sebagai seorang nelayan. Para perempuan nelayan seperti Nani saat ini harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga nelayan. Di waktu luang, Nani harus bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. "Saya bilang sama suami saya, 'Bang, kalau bawa perahu, ambil itu botol-botol plastik, lumayan buat nambah-nambah uang.'… Apa aja buat nambah penghasilan", ujar Nani. Terkadang ia juga menjual baju-baju bekas mereka demi mendapatkan uang tambahan.

Sementara di Kampung Kamal Muara, lokasi penelitian saya selain Kampung Akuarium, ada beberapa subjek penelitian yaitu Asnah (56 tahun), Nuraini (34 tahun), dan Umi (55 tahun) yang harus beralih profesi dari pemilik beberapa buah bagan kerang hijau menjadi buruh pembersih kerang. Bagan kerang hijau adalah tempat kerang-kerang hijau diternakkan. Bagan-bagan itu dibuat dengan cara menancap bambu-bambu yang tingginya disesuaikan dengan dalamnya air laut, yang biasa disebut bagan, dan biasanya berbentuk segi empat. Di setiap bambu-bambu tersebut diikatkan tali-tali besar yang menjuntai di dalam air, tempat kerang-kerang hijau akan menempel di situ. Anakan kerang hijau akan datang sendiri, dan tidak secara sengaja disebarkan, seperti halnya ikan-ikan laut yang memang secara alami dimiliki oleh daerah tertentu saja.

Setelah penggusuran, Asnah mendapatkan penggantian bagannya sebesar enam juta lima ratus ribu rupiah dari dua bagan kerangnya, tapi setelah itu ia mengaku hidupnya menjadi miskin. Begitu juga pengakuan Nuraini dan Umi yang sama-sama kehilangan sumber penghasilannya sebagai pemilik bagan-bagan kerang, walaupun jumlahnya hanya satu atau dua bagan.

> "Aduh, bukan susah lagi. Kalau dulu mah enak, ada bagan ada ini... Dulu eee kan sampe situ kerang hijau, tinggal sedikit doang itu mata pencarian, ikannya … Dulu mah sehari seratus ribu dapat. Sekarang *gak* tentu. Paling bangsa sepuluh ribu dua belas ribu." (Asnah 2017, wawancara 7 Mei)

Kerang hijau mulai diperkenalkan pada tahun 1995 oleh Presiden Suharto dengan menanam rumpon-rumpon di Kepulauan Seribu. Hasil panennya ternyata sangat baik dan membuat para nelayan kemudian menginvestasikan harta miliknya pada bagan-bagan kerang di Kamal Muara. Umi adalah satu perempuan petani dari Jambi yang tertarik pada cerita-cerita kerabatnya mengenai "tambang emas" kerang hijau sehingga ia dan suaminya menjual rumah dan sawahnya pada tahun 2005 lalu berpindah ke Kamal Muara untuk beralih profesi menjadi nelayan kerang hijau. Menurut cerita-cerita perempuan nelayan di Kamal Muara, dari investasi sekitar Rp3.000.000,00 saja untuk pembuatan satu bagan kerang, mereka bisa memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp3.000.000,00 per bulannya. Maka tidak mengherankan perkampungan di muara sungai kemudian berubah menjadi sentra produksi kerang hijau

karena wilayah itu ternyata sangat subur dengan bibit-bibit kerang.

Pada tahun 2006, bagan-bagan kerang yang dimiliki oleh masyarakat nelayan ternyata harus digusur dengan alasan-alasan yang tidak jelas bagi mereka. Lambat laun mereka mulai mengetahui bahwa laut tempat mereka berusaha akan diuruk dan dibangun pulau. Oleh pengembang pulau, mereka dibayar sekitar Rp3.000.000,00 per bagan sebagai ganti rugi material dan bambu-bambu yang mereka buat untuk bagan. Menurut para perempuan nelayan yang saya temui, uang tersebut kemudian habis dalam hitungan dua bulan saja untuk keperluan konsumsi. Biaya ganti rugi tersebut bahkan tidak mencukupi untuk modal membuat bagan kerang di laut yang lebih dalam. Di laut yang dalam, mereka membutuhkan sekitar Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 untuk membuat bagan-bagan baru karena bambu-bambu yang diperlukan semakin banyak.

Saat ini Umi masih memiliki dua bagan kerang. Di pagi hari ia mengolah kerang-kerang produksi mereka sendiri. Tetapi di siang hari, ia bekerja sebagai kuli pengopek (mengambil daging kerang dari cangkangnya), demi uang sebesar Rp2,500 per kilonya. Ia dapat membersihkan antara dua hingga empat kilogram daging kerang hingga sore hari. Umi bertahan tinggal di Kamal Muara karena menurutnya pekerjaan sebagai nelayan memberikan peluang kerja yang lebih baik dari pada menjadi petani. Ketika menjadi petani, ia tidak memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang karena semua pekerjaan dilakukan oleh laki-laki. Karena itu, sesulit apapun, Umi akan tetap bertahan sebagai nelayan kerang hijau di Kamal Muara.

Upah menjadi buruh pembersih kerang yang diterima oleh para perempuan tersebut adalah sebesar Rp3.000 per ember berukuran sedang. Total upah yang mereka terima selama bekerja dari pagi hingga sore adalah sebesar Rp15.000 hingga Rp24.000 sehari. Pekerjaan membersihkan kulit kerang dari benang dan kotoran-kotoran laut, membuka cangkang dan mengambil daging kerang, hampir semua dilakukan oleh perempuan. Sementara kerja laki-laki seperti Pak Ahmad (78 tahun) di Kamal Muara diupah sehari sebesar Rp85.000 sebagai pengangkut kerang. Meskipun sudah tua, Pak Ahmad masih kuat mengangkut kerang-kerang hingga puluhan kilogram. Menurutnya upahnya lebih tinggi daripada pengupas kerang karena hal itu membutuhkan tenaga yang lebih besar.

Di Kampung Kamal Muara, saya juga berkenalan dengan seorang ibu yang kemudian menjadi subjek utama penelitian saya, sebut saja ibu Zubaedah (55 tahun). Ia adalah seorang juragan kerang yang terkemuka di Kamal Muara. Sebelumnya, ia memiliki penghasilan sekitar Rp20.000.000,00 hingga Rp30.000.000,00 karena ia memiliki lebih dari lima puluh bagan kerang. Penggusuran laut untuk pulau-pulau B dan C di Kamal Muara menyisakan sekitar tujuh bagan kerang miliknya di laut yang dalam. Dari penggusuran tersebut, ia memperoleh uang sekitar Rp150.000.000,00 yang akhirnya dibelikan tanah dan dibangun menjadi sebuah warung. Sekarang ini menurutnya, penghasilannya paling banyak hanyalah sebesar Rp5.000.000,00 sebulan yang dirasakannya kurang karena ia memiliki empat orang anak yang sedang berkuliah. Pengalaman hidupnya akhirnya mengajarkannya agar anak-anaknya tidak bergantung pada pekerjaan sebagai nelayan. Untuk mengatasi kesulitan keuangannya, Zubaedah membuat kerupuk kemplang dan dijual kepada wisatawan yang mampir ke warungnya. Di akhir pekan, ia juga bekerja menjadi juru masak ketika ada tetangganya yang mengadakan perhelatan.

Menjadi nelayan kerang hijau, adalah strategi Zubaedah dan suaminya untuk menghadapi hari tua. Karena usia suaminya yang semakin menua, maka uang tabungan dari penghasilan sebagai nelayan diinvestasikan dalam bentuk bagan-bagan kerang hijau. Mereka adalah para nelayan generasi pertama yang beternak kerang. Dan benar saja perhitungannya, investasi mereka kemudian menghasilkan hasil luar biasa yang dengan cepat diikuti oleh para nelayan lainnya dan memancing pendatang-pendatang baru yang mengadu nasib sebagai nelayan peternak kerang hijau. Hingga akhirnya rencana reklamasi menghapus kejayaan mereka sebagai pemilliki bagan-bagan kerang dari laut di Kamal Muara sejak tahun 2006.

> "Jadi, kerang sama menangkap ikan itu, lebih mudah kerang. Pak Haji namanya sudah tua, sudah susah nangkap ikan. Jadi satu-satunya jalan bikin kerang hijau. Alhamdulillah kemaren-kemaren berhasil bikin kerang hijau. Ada lagi apa namanya, ada lagi bangunan ini (reklamasi). Langsung dia (Pak Haji berkata) 'Aduh gimana, nanti kerja gimana lagi'. Soalnya nelayan, katanya harusnya habis (musnah di Kamal Muara-penulis)." (Zubaedah 2017, wawancara 7 Mei)

Zubaedah bercerita meskipun masih ada tujuh buah bagan kerang miliknya yang tidak terkena penggusuran laut, tetapi hasil panennya menjadi rusak karena proses penyedotan pasir dan penimbunan laut. Sampah semakin banyak karena proses pengisapan dan pencucian pasir laut. Oleh karenanya, seringkali panen harus dilakukan cepat-cepat ketika kerang-kerang tersebut masih kecil-kecil, agar kerang-kerang tidak mati sebelum panen.

Padahal kerang-kerang tersebut sebetulnya belum layak untuk dipanen.

> "Adanya pulau-pulau (reklamasi) itu bikin kerang *enggak* bagus. Jadi kerang hijau itu maunya airnya bening. Sedangkan ini kan pasirnya selalu diolah terus. Kapal keluar masuk, jadi penghasilan kerang juga berkurang." (Zubaedah2017, wawancara7 Mei)

Akan tetapi Zubaedah tidak mempersoalkan penurunan pendapatannya akibat reklamasi, ia menganggap bahwa penurunan penghasilannya adalah takdir yang harus dihadapinya.

> "Jadi nelayan itu ya, … kita sedikasihnya aja sama yang di atas. Kadangkala, kita pergi melaut hari ini enggak dapat apa-apa, ya diterima saja. Besok kita dapat… Jadi saya enggak lihat ini karena reklamasi atau apa ... yah sekarang enggak ada penghasilan, ya barangkali nanti keadaan bisa balik lagi kayak dulu." (Zubaedah 2017, wawancara 7 Mei)

Zubaedah mengungkapkan hal tersebut sambil tertawa ketika saya tanyakan perasaannya mengenai penurunan pendapatannya. Menurut Zubaedah yang lebih membuat hati para nelayan galau adalah adanya isu penggusuran kampung mereka. Menurutnya, lambat laun hal itu mungkin akan terjadi karena Pulau B dan C hanya berada sekitar seratus hingga dua ratus meter di seberang rumah mereka, dan lingkungan kampung mereka yang kumuh akan mengganggu pemandangan dari pulau-pulau tersebut. Akan tetapi menurutnya, relokasi nelayan ke rumah susun yang jauh dari pantai tidaklah mungkin bagi masyarakat nelayan. Zubaedah menerangkan bahwa para nelayan tidak mungkin meninggalkan perahu-perahu begitu saja di laut karena dapat tenggelam keesokan harinya.

> "Biarpun bagus juga, sebagus-bagusnya perahu kayu, pasti ada airnya, pasti. Namanya juga tinggalnya di air. Lubang sebesar jarum aja, air juga masuk (tertawa)… Sekarang kalau dipikirin, mau apa kita di rumah susun?… Makanya kita *enggak* mau nerima kalau dibikinin rumah susun. Mau apa kita di situ? Artinya mau apa kita, memangnya kita perlu tempat tidur aja? Masak kita tinggal di sana, di rumah susun, sedangkan perahu ada. Sedangkan perahu ini Bu, setiap dua jam sekali harus ditimba airnya. Kalau *enggak* ditimba *kan* entar tenggelam. Ini nih, sebentar lagi, tuh tuh sudah banyak airnya. Tuh sudah dipompa airnya [sambil menunjuk pekerjanya yang sedang menimba air keluar dari perahunya]." (Zubaedah 2017, wawancara 7 Mei)

Dalam wawancaranya dengan saya, Zubaedah meminta pemerintah untuk memikirkan nasib dirinya dan nelayan-nelayan lainnya dan peralatan melaut mereka apabila harus dipaksa dipindahkan ke rumah susun, karena menurut mereka peralatan nelayan seperti motor tempel, jaring-jaring, bambu-bambu, tidak begitu saja dapat disimpan di sembarang tempat.

> "Kalau saya mah, Bu, tapi ini mah namanya masih gosip ya. Katanya memang mereka ini, daerah sini ini mau dibikin rumah susun. Tapi banyak mereka, nelayan-nelayan *enggak* mau. Kenapa banyak mereka-mereka *enggak* mau? Karena kita punya bambu, Bu mau ditaruh mana coba, kalau mau ditaruh di rumah susun? Nelayan itu kan perabotannya *enggak* ada yang bagus. Ya gini-gini aja, tambang, apa kan? Mau dinaikin ke atas? *enggak* mungkin kan? Udah gitu, seperti motor-motor, seperti tambang-tambang itu mau taruh di mana? Masak iya, mau ditaruh di rumah susun? … *Enggak* ada kerjaan [kerja produktif-penulis]. Kita *kan* butuh makan, butuh belanja. Bukan kita butuh tempat tidur *doang*". (Zubaedah 2017, wawancara 10 Mei).

Sementara itu, Asih (bukan nama sebenarnya, 54 tahun) seorang perempuan pedagang ikan di Kamal Muara juga mengeluhkan isu-isu mengenai penggusuran di daerah itu. Apabila harus memilih, ujar Asih kepada saya, ia akan memilih tetap memiliki sumber penghasilannya meskipun harus hidup di tempat kumuh, daripada hidup di tempat yang baik tapi tak punya penghasilan. Ketika menanggapi pertanyaan saya mengenai penggusuran kampung nelayan, dengan sangat emosional, dia menjawab:

> "Sekarang begini, tempat usaha digusur, kan? Tempat usaha termasuk tempat tinggal, digusur. *Diadain* rusun, nah rusun bayarnya sembilan puluh ribu sebulan, listrik lain, air lain … sekarang kalau dia *kagak* mencari [uang] mau bayar pakai apa? Coba *pikirin*, adanya rusun di Lagoa, nah kalau *kagak* mencari? Jangankan duit seratus ribu, seribu juga setengah *modar*, *kagak* ada yang buang itu *duit* seribu. Pakai apa itu bayarnya? 'Siapa suruh itu bikin tenda' [meniru ucapan seorang pejabat]. eehhh *enggak mikir* .. 'saya udah siapin itu rumah [susun]' [ia meniru lagi]. eehh *enggak mikir*… Zaman pemerintahan sekarang susah banget *nyari duit*." Ia kemudian menyumpah-nyumpah sendiri dan bercerita panjang lebar mengenai penggusuran-penggusuran terhadap para pedagang di wilayahnya yang menyebabkan matinya banyak usaha warung tegal yang dahulu merupakan para pelanggannya. (Asih 2017, wawancara 1 Juni)

Berbeda dengan di Kamal Muara, di Kampung Akuarium sosialisasi pembangunan pulau-pulau buatan di Teluk Jakarta dirasakan masyarakat nelayan sangat minim, apalagi kepada perempuan nelayan. Oleh karena itu banyak dari para perempuan nelayan yang tidak melihat langsung pembangunan pulau-pulau tersebut dan tidak mengetahui keberadaannya, kecuali

dari cerita-cerita para suami mereka yang pergi melaut, seperti dituturkan Ridwan (nama samaran), nelayan di Kampung Akuarium.

> "Kita *enggak* tahu bagaimananya sebelumnya, kita tahu-tahunya udah dibangun. Kita tahunya ikan pada kemana. Kita lihat tongkangnya bawa pasir. Liat-liat kok laut diuruk, buat apa? Oh buat pulau, rencananya mau buat pulau langsung ke Pulau Seribu. Begitu rencananya. Lama-lama merembet ke Muara Baru, bukan lari ke *sono* (Pulau Seribu), larinya ke sini, ke Timur. Lama-lama kalau kita mau pasang jaring enggak ada ikannya, keruh itu airnya kalau kita lewat, sampai tercemar sampai ke Pulau Damar, Pulau Air. Kita biasa ke Pulau Damar, dari sini itu hampir 38 mil (70,38 kilometer). Kalau lari empat jam lebih, itu tiga puluh lima liter solar. Makanya kita itu tadi banyakan pengeluarannya daripada pemasukannya." (Ridwan 2017, wawancara 25 April)

Strategi Perempuan Nelayan Mengatasi Penurunan Pendapatan

Meskipun beberapa pejabat mengelak mengenai keterkaitan penggusuran dengan reklamasi, namun sulit untuk tidak setuju, ketika kita melihat posisi pulau-pulau reklamasi yang berada tak jauh dari kampung-kampung nelayan. Hunian mewah berupa gedung-gedung apartemen, hotel, dan mal, juga dipercaya para nelayan lambat laun akan mengusir mereka dari kampung mereka sekarang, Kamal Muara. Apalagi mengingat harga tanah mencapai Rp30.000.000,00 per meter perseginya atau hunian dengan harga setidaknya Rp3.000.000.000 per unitnya. Padahal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di tempat yang mereka tinggali sekarang yang hanya beberapa ratus meter dari pulau-pulau reklamasi adalah Rp464.000 rupiah saja per meternya (Saputra 2016).

Sementara itu dari wawancara yang saya lakukan dengan seorang perempuan nelayan lainnya Herni (62 tahun), saya mendapatkan jawaban bahwa kesulitan para perempuan nelayan dirasakan bukan hanya karena menipisnya ikan yang disebabkan oleh pencemaran, tetapi juga penggusuran Pasar Ikan yang merupakan tempat para perempuan menjual ikan asin yang mereka produksi.

> "Dulu masih ada pengepul ikan asin di Pasar ikan. Dulu, nih ada ikan sekian kilo, diambil sama dia. Entar kalau *udah* laku semua, baru dikasih duitnya. Kalau sekarang, *mah* susah, Bu. Mau jual sendiri, susah, *enggak* laku, ya *digaremin* kayak gini … Dulu biasanya ikan asin dijual setumpuk-setumpuk, setumpuk lima ribu *perak*. Tapi sekarang mau dijual juga cuma sedikit, jauh lagi pasarnya." (Herni 2017, wawancara 26 Mei)

Sekarang ini, Herni tetap memproduksi ikan asin karena beberapa anak laki-lakinya tetap aktif menangkap ikan-ikan kecil di tepi laut yang bersebelahan dengan rumah mereka. Herni mengaku bahwa mereka sendiri sebenarnya tidak menyukai ikan-ikan asin yang mereka produksi. Ikan-ikan itu biasa mereka sediakan untuk para tetangga yang membutuhkan lauk ketika mereka tidak punya uang. Menurut Herni, biasanya para tetangga mereka akan menggantikannya di lain waktu dengan barang lainnya yang mereka miliki di lain hari. Saya melihatnya seperti sistem barter *"pay forward"*, yang dibayar ketika mereka memiliki uang atau ketika mereka memiliki barang yang dibutuhkan keluarga Herni. Begitu pula yang terjadi di Kamal Muara, para produsen kerang hijau dan ikan asin seperi Eni dan Tuti, akan memperbolehkan para tetangga mereka untuk mengambil hasil produksi mereka untuk konsumsi secukupnya, sekadar untuk lauk ketika mereka tak punya uang. Ada ikatan kekeluargaan di antara para perempuan untuk saling membantu ketika mereka kesusahan. Hal itulah yang mereka takutkan akan hilang, ketika mereka harus direlokasi ke lokasi lain. Di tempat mereka tinggal sekarang, meskipun mereka tak punya uang, mereka masih dapat memperoleh bahan makanan dan saling bergantung pada lingkungannya.

Herni yang saya temui, awalnya terlihat enggan untuk bercerita mengenai pengalamannya menjadi perempuan nelayan. Yang keluar dari mulutnya hanya perasaan kesal dan kata-kata "Saya susah sekarang". Ia terlihat sangat kesal pada suaminya yang menurutnya tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya.

> "Pusing. Kapan dapat rejeki, yah kasarnya buat makan. Pusing, *ngeluh* aja, selama bongkaran ini. Selama bongkaran ini *ngeluh* (diulang) untuk makan sehari-hari. Nih kalau udah makan sore, ya udah, ketutup pikiran. Adem, udah tidur. Pagi, makan apa lagi, pusing lagi. Bapaknya kalau ada duit dikasih, kalau enggak ada, diem," katanya. (Herni 2017, wawancara 7 Mei)

Herni juga mengeluhkan bahwa dirinya kehilangan para tetangganya hal ini dikarenakan mereka harus pergi berpencar-pencar. Beberapa istri nelayan harus hidup terpisah dengan suaminya karena mereka memilih untuk pulang kampung, sementara suaminya tetap tinggal di Kampung Akuarium.

> "Dulu akrab ama tetangga. Sekarang udah pada enggak ada, banyak yang ngeluh, karena enggak punya, mau minta ama siapa, mau minta bantu ama siapa. Dulu kan bisa tukar pikiran ama tetangga. Sekarang udah enggak ada tetangga. Sedangkan anak

> ini, di kampung [anak yang menemani wawancara]. Ini tetangga yang deket, sama-sama pusing juga. Sama aja. Sama-sama susah juga." (Herni 2017, wawancara 21 April)

Sementara Eni dan Tuti sebagai produsen ikan asin juga kehilangan pendapatannya karena bahan baku ikan asinnya menjadi sulit. Produsen ikan asin di Kamal Muara dahulu memiliki pendapatan yang cukup baik karena melimpahnya stok ikan yang ditangkap di Teluk Jakarta, sehingga harga ikan sangat murah, yang berimbas pada harga ikan asin yang baik. Dengan menurunnya pasokan ikan di Teluk Jakarta, produksi menjadi sulit dan harga ikan pun menjadi mahal sehingga permintaan ikan asin menurun drastis. Eni mengalami masa-masa paceklik yang cukup panjang karena produksinya terbatas pada ikan teri saja. Tidak demikian halnya dengan Tuti. Ia bersedia mengolah ikan apa saja, sehingga ketika pasokan ikan segar dari Teluk Jakarta langka, ia kemudian bertahan dengan cara membeli sisa-sisa ikan yang dijual di pelelangan Kamal Muara yang berasal dari seluruh pelosok nusantara.

Karena turunnya permintaan ikan asin dari pelele (penjual keliling), Tuti akhirnya berjualan ikan asin di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kamal Muara sejak pukul dua dini hari. Ia berharap ada saja para pengunjung yang akan membeli ikan asinnya. Ketika berjualan ikan asin itu, Tuti kemudian mendapatkan ide untuk memborong ikan-ikan basah ketika pasar hampir tutup pada pukul enam hingga tujuh pagi. Ia memanfaatkan kekhawatiran pedagang ikan sehingga ia dapat membeli bahan baku ikan asinnya dengan harga murah. Dengan strategi itu ia dapat mempertahankan usahanya, meskipun diakuinya ia harus bekerja lebih lama lagi, yaitu sejak pukul dua pagi demi mendapatkan pembeli sekaligus dapat bersiaga untuk dapat membeli ikan di pelelangan.

Lewat pukul tujuh pagi, Tuti kemudian disibukkan dengan kerja-kerja reproduksi sekaligus produksinya. Ia memiliki beberapa karyawan yang memproduksi ikan asin. Tetapi tetap saja, suami, anak dan menantunya menimpakan semua pekerjaan reproduksi seperti mencuci piring, membersihkan rumah, hingga mengantar cucunya ke sekolah pada dirinya. Padahal menurutnya, ia adalah pencari nafkah utama dalam rumah tangganya. Sebagai perempuan, ia merasakan ketidakadilan. Tuti menyatakan pada saya bahwa kadangkala ia merasa sakit hati atas perlakukan mereka pada dirinya.

Seperti Zubaedah, dalam mencari tambahan penghasilan, Asnah mencoba mencari alternatif pemasukan dengan cara menjadi juru masak ketika ada hajatan di Kamal Muara. Akan tetapi Asnah juga mengakui bahwa ia seringkali harus meminta uang dari anak-anaknya.

> "Haduh bagaimana … Sedih kalau udah mau belanja, enggak cukup, kaya mau nangis, tapi masih ada anak-anak itu tinggal, masih ada itu dua biji anak saya lelaki, ama saya. 'Ibu mau beli beras, nak.' udah dikasih. Ada tiga puluh atau empat puluh. Kalau banyak hasil banyak, kalau sedikit ya sedikit juga. Kadang-kadang juga enggak turun, kalau anak-anak lagi capek kali atau ikut ama om nya itu tur-tur, apa itu, muatan ke pulau, pulau lagi ke pulau lagi, tuh anak saya satu. Dikasih itu sama omnya lima puluh, saya dikasih dua puluh, dia ngambil tiga puluh. Kalau dikasih saya simpan di celengan. Lima ratus, eh lima ribu, dua ribu, tiga ribu." (Asnah 2017, wawancara 7 Mei)

Pengalaman yang sama juga diakui oleh beberapa nelayan seperti Eni, Nani, dan Herni. Mereka juga bergantung pada kerja-kerja yang dilakukan oleh anak mereka. Nani misalnya meminta anaknya yang bekerja sebagai pegawai bank swasta untuk kembali tinggal di lokasi bekas gusuran sehingga uang kos anaknya sebesar enam ratus ribu sebulan itu dapat digunakan untuk keperluan mereka. Begitu pula dengan Eni, ketika ikan teri sulit diperoleh untuk bahan baku ikan asinnya, ia bergantung pada menantunya yang bekerja sebagai tenaga satuan pengamanan (satpam). Sementara Herni dan Asnah juga seringkali harus meminta bantuan dari anak-anak mereka yang bekerja dengan beraneka profesi, dari buruh nelayan, hingga penyanyi dangdut keliling.

Marginalisasi Perempuan Nelayan

Dengan melihat langsung dampak reklamasi pada kerja dan pendapatan perempuan nelayan di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, saya melihat ketimpangan gender yang terjadi. Menurut Walby, ketimpangan tersebut terjadi karena pola pikir sistem patriarkal yang luput melihat perempuan sebagai entitas penting dalam masyarakat. Sistem patriarkal adalah struktur sosial yang mendominasi yang mengopresi dan mengeksploitasi perempuan (Walby 1990, h. 20). Sebagai implikasi dari dianutnya sistem ini, laki-laki memegang posisi sebagai pihak yang dominan, sementara perempuan adalah pihak yang tersubordinat.

Menurut Walby sistem patriarkal dikonseptualkan dengan beberapa tingkatan. Pada tingkat tertinggi ia mengejawantah dalam sistem relasi sosial, dalam tingkat yang lebih rendah, sistem ini tersusun oleh enam struktur yang satu sama lain saling berhubungan. Enam struktur tersebut adalah pertama dalam moda produksi rumah tangga, perempuan menjadi pekerja domestik dan laki-

laki memberikan perlindungan dalam hal ekonomi. Kedua, segregasi kerja berdasarkan gender akhirnya menempatkan perempuan pada pekerjaan-pekerjaan dengan keterampilan rendah. Sistem patriarkal ini sangat erat kaitannya dengan sistem kapitalisme dan rasisme yang akhirnya berimplikasi pada kebijakan bias gender. Pada tingkatan selanjutnya, sistem ini kemudian menempatkan perempuan menjadi subordinat yang akhirnya seringkali terjadi produksi kekerasan-kekerasan pada perempuan. Dalam struktur selanjutnya, hubungan heteroseksual menjadi norma standar, yang memproduksi subordinasi dan penindasan terhadap perempuan. Pada tingkatan terakhir, sistem patriarkal dipelihara dan dirawat oleh negara melalui kebijakan-kebijakannya.

Dari uraian sebelumnya telah diterangkan bagaimana struktur patriarki di atas beroperasi pada masyarakat nelayan. Segregasi kerja sebagai dampak dari reklamasi menempatkan para perempuan nelayan pada kerja-kerja tidak terampil dan berupah rendah. Kebijakan reklamasi yang sangat bias gender akhirnya juga merenggut kehidupan para perempuan nelayan dan memiskinkan mereka. Sistem patriarkal tersebut mengejawantah pada kebijakan pemerintah yang luput melihat entitas perempuan nelayan dalam pembangunan wilayah pesisir. Kebijakan yang luput melihat entitas perempuan nelayan tersebut dapat dilihat pada kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pulau G, kajian tentang pengaruh reklamasi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang sangat minim (Analisis Dampak Lingkungan Rencana Reklamasi Pulau G di Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta 2013). Bahkan perempuan nelayan yang menanggung beban terbesar dari dampak reklamasi Teluk Jakarta tidak terlihat dalam kajian tersebut. Selanjutnya Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta juga menyebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dibuat oleh pemerintah provinsi Jakarta tidak melalui proses yang benar dan tidak mempertimbangkan masalah sosial ekonomi termasuk dampak yang akan timbul yang dialami oleh masyarakat, perempuan dan laki-laki (2017, Siaran Pers Bersama 30 Agustus).

Menurut Iris Young, marginalisasi adalah salah satu bentuk penindasan, kesewenang-wenangan dari kaum penguasa (1990, h. 42). Pemikir dan feminis sosialis tersebut mengidentifikasi lima bentuk penindasan terhadap perempuan selain marginalisasi yaitu eksploitasi, ketidakberdayaan (powerlessness), serta kekerasan secara sistematis terhadap perempuan, dan imperialisme budaya. Pada perempuan nelayan di Teluk Jakarta, saya melihat fenomena penindasan berupa marginalisasi perempuan nelayan. Mereka dipinggirkan pada fungsi-fungsi kerja tidak terampil yang berupah rendah dan memiliki jam kerja panjang. Di luar itu, beberapa dari mereka juga menyerah dari upaya peminggiran ke lokasi-lokasi tempat tinggal yang tidak lagi memungkinkan mereka untuk melakukan kapasitas kerjanya sebagai nelayan.

Young (1990) menegaskan bahwa marginalisasi mungkin merupakan bentuk yang paling berbahaya dari berbagai bentuk opresi lainnya karena tindakan-tindakan ini membuat orang lain menjadi tidak dapat lagi berpartisipasi dalam kehidupan sosial sehingga implikasinya adalah kemiskinan yang parah[1], bahkan dapat menimbulkan kematian karena keadaan kekurangan tersebut, seperti kutipannya berikut ini:

> *Marginalization is perhaps the most dangerous form of oppression. Via marginalization, a whole category of people is expelled from useful participation in social life and thus potentially subjected to severe material deprivation and even extermination. The material deprivation marginalization often causes is certainly unjust, especially in society where other have plenty* (1990, h. 186).

Konsep marginalisasi perempuan sendiri muncul dari Allison Scott, yang dapat berupa proses pengucilan *(exclusion)*, yaitu penggeseran perempuan ke peran-peran kerja pinggiran *(margins),* sebagai proses feminisasi atau segregasi kerja perempuan pada peran-peran kerja tertentu saja, dan sebagai proses ketimpangan ekonomi (Scott dikutip dalam Saptari & Holzner 1997, h. 9). Proses marginalisasi perempuan, menurut Saptari dan Holzner dalam bidang pekerjaan terjadi akibat ketimpangan ekonomi. Proyek reklamasi telah mengeliminasi pekerjaan-pekerjaan sebagai peternak kerang hijau di laut dangkal di mana mereka bisa mengupayakan bagan-bagan dengan modal yang relatif rendah. Pengambilalihan wilayah laut tersebut membuat para perempuan nelayan menjadi lebih miskin.

Apabila kita datang dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi di pesisir Teluk Jakarta, sangat mudah kita melihat fenomena peminggiran yang terjadi pada para perempuan nelayan di sana. Saya mungkin memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan melalui kata-kata bagaimana para perempuan nelayan yang saya temui berjuang mengatasi peminggiran ini. Tetapi dengan hadir di lokasi-lokasi tersebut, saya dapat melihat dengan jelas pemiskinan dan marginalisasi yang terjadi. Sementara, melalui media saya juga melihat bagaimana keberpihakan pengambil keputusan kepada

proyek kapitalisme yang mungkin akan memberikan keuntungan berupa pemasukan pajak bagi negara, tetapi di sisi lain merenggut kehidupan dan sumber penghidupan para perempuan nelayan. Tidak hanya itu, saya juga mengamati penggiringan opini masyarakat bahwa masyarakat nelayanlah yang bersalah dan harus mengikuti kehendak pemerintah untuk menyingkir dari daerah-daerah pesisir Teluk Jakarta. Kita dengan mudah merasakan dan melihat sistem kapitalisme yang berkelindan dengan sistem patriarkal terlihat sangat kental dalam fenomena reklamasi Teluk Jakarta dan penggusuran kampung-kampung nelayan di pesisir yang terjadi sebagai implikasi proyek tersebut. Peminggiran perempuan nelayan menjadi implikasi yang sayangnya tidak dilihat sebagai hal krusial oleh banyak pihak, terutama para pengambil keputusan. Saya menganalogikan masalah ini dengan terjadinya bencana, kehancuran yang mereka rasakan sulit digambarkan, kecuali bila kita melihat dan merasakannya sendiri.

Saya juga mengamati respons-respons dari masyarakat di media sosial terkait reklamasi dan penggusuran serta nasib para perempuan nelayan. Saya melihat ada stigmatisasi dari masyarakat pada kelompok masyarakat nelayan yang seolah-olah menghambat proses pembangunan dan beberapa saya lihat juga melabeli nelayan yang tergusur dengan "pencaplok tanah negara" karena status wilayah yang mereka tinggali adalah tanah negara. Menurut Camat Penjaringan, Muhammad Andri, (2017, wawancara tanggal 25 Mei), ada beberapa kampung nelayan di kawasan pesisir yang meskipun statusnya tanah negara, tetapi sebetulnya dapat ditingkatkan menjadi hak milik, dan Kamal Muara adalah salah satunya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Kampung Akuarium, karena tanah tersebut adalah tanah yang diperuntukkan untuk lingkungan cagar budaya Kota Tua.

Kisah-kisah dari para subjek penelitan saya mengenai kembalinya para penghuni rumah susun di Rawa Bebek ke lokasi penggusuran karena mereka tidak dapat lagi membayar uang sewa rumah susun, juga saya dengar. Di lain pihak, saya pun mengamati stereotip dari para masyarakat umum yang tidak melihat kondisi lapangan. Mereka mengatakan para nelayan adalah penduduk yang tidak bersyukur, mereka menolak pemberian fasilitas rumah susun yang bersih, tetap kembali lagi ke lokasi penggusuran. Dengan hilangnya sumber pendapatan, maka menurut saya masuk akal apabila mereka mencoba bertahan dengan kembali ke lokasi tempat tinggal mereka dahulu. Saya mendapati fakta bahwa di lokasi tersebut, setidaknya mereka masih bisa mendapatkan makanan dari upaya mereka menangkap ikan di tepi laut meskipun hasilnya sangat terbatas.

Terkait dengan stigmatisasi terhadap masyarakat nelayan yang kehilangan penghasilan dan tergusur, saya rasa tepat kiranya Nel Nodding menerangkan hal "kita melawan mereka", sebagai analogi orang "berpunya" mengutuk orang miskin yang dianggap sebagai pihak yang pantas diperlakukan seperti itu. Fenomena tersebut diterangkan Nodding sebagai kecenderungan manusia untuk menyalahkan korban (Tong 2010, h. 235). Cara pandang itulah yang kemudian disebut Tong sebagai cara-cara berpikir yang maskulin. Paling tidak, ketidakberpihakan sebagian masyarakat tersebutlah yang akhirnya mendorong saya untuk melihat lebih dalam pada pengalaman-pengalaman para perempuan nelayan dan dinamika perjuangan hidup mereka yang berjuang menghadapi ketidakadilan tersebut.

Menurut Young, masalah stereotip, diskriminasi, dan eksklusi, terjadi karena beberapa orang secara salah memercayai identifikasi kelompok itu membuat perbedaan pada kapasitas anggota kelompok tersebut. Konsepsi individualis ini tentang orang-orang dan hubungannya satu sama lain cenderung untuk mengidentifikasi penindasan. Dengan identifikasi kelompok penindasan, dalam pandangan ini, adalah sesuatu yang terjadi pada orang ketika mereka dikualifikasikan dalam kelompok-kelompok. Orang seharusnya diperlakukan sebagai individu- individu, bukan sebagai anggota kelompok, dan diizinkan untuk membentuk hidup mereka secara bebas tanpa stereotip atau norma kelompok (Young 1990, h. 43).

Young kemudian melihat isu-isu ketidakadilan dan marginalisasi tidak lagi terbatas pada isu feminisme dengan fokus perempuan, tetapi pada bahasan-bahasan mengenai humanisme yang terkait dengan ketidakadilan. Menurut Young, ketidakadilan seringkali timbul akibat status ketidakberdayaan (*powerless*), status dan pekerjaan seseorang (Young 1990, h. 56). Ketidakberdayaan yang dialami oleh para perempuan nelayan akibat proyek reklamasi, menghambat pengembangan kapasitas para perempuan tersebut, akhirnya juga menghambat keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya, serta perlakuan diskriminasi lainnya.

Fenomena mengenai marginalisasi perempuan nelayan pada kasus reklamasi Teluk Jakarta memperlihatkan bagaimana negara belum dapat melaksanakan amanah Undang-undang Dasar 1945 ayat 33, UUD 1945 tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, bahwa pemanfaatannya seharusnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Begitu pula hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat nelayan akibat reklamasi Teluk Jakarta telah melanggar amanat terhadap negara seperti termaktub pada UUD 1945 pasat 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Persoalan ketidakadilan struktural tersebut menurut Young juga terjadi di banyak negara-negara berkembang, diproduksi oleh dominasi sistematis yang menghambat kapasitas seseorang untuk berkembang, dan hal tersebut diproduksi ulang oleh banyak orang, yang mungkin adalah bagian dari kita sendiri. Kasus reklamasi yang berjalan beriringan dengan penggusuran kampung nelayan dengan dalih penertiban, masalah akses terhadap perumahan yang layak adalah masalah yang jauh lebih besar, sementara pihak-pihak lainnya alih-alih membantu, malahan menambahkan persoalan yang lebih besar lagi, seperti stereotip dan marginalisasi perempuan nelayan yang telah diuraikan di atas. Dari wawancara dan pengamatan yang saya lakukan, stereotip pada para perempuan nelayan yang tergusur melukai hati para perempuan nelayan. Mereka mengatakan relokasi tidak menjadi masalah sepanjang pekerjaan mereka tidak hilang, tetapi yang terjadi adalah menempatkan rumah yang jauh dari pantai. Hal ini sama saja dengan membunuh penghidupan yang pada akhirnya dapat membunuh mereka. Di lokasi penelitian saya, saya melihat nelayan tua yang kehilangan rumah akhirnya hidup sendiri di dalam perahunya, dengan bergantung pada belas kasihan tetangganya. Seringkali ia mengaku harus minum dari air hujan yang ditampungnya.

Para perempuan nelayan yang menjadi subjek penelitian saya menegaskan bahwa tidak mungkin mereka hidup tanpa penghasilan, karena setiap hari seluruh keluarga mereka harus makan. Reklamasi dan penggusuran adalah sebuah ketidakadilan untuk mereka. Menurut Young, ketidakadilan tersebut diproduksi oleh kebijakan yang represif dan membuat posisi perempuan miskin menghadapi kemungkinan menjadi tuna wisma. Ketidakadilan struktural terjadi sebagai konsekuensi dari individu-individu atau lembaga-lembaga yang mengejar ambisi-ambisi mereka (Young 2013, h. 52). Ambisi dalam hal ini adalah ambisi para pengambil keputusan berkaitan dengan target pembangunan reklamasi ini.

Uraian Young tersebut menerangkan fenomena keberpihakan kaum berkuasa pada kaum kapitalis yang mengejar keuntungan semata dan kalangan pengambil keputusan yang mengejar ambisi-ambisi mereka. Karena itu untuk menanggulangi dampak pembangunan yang memarginalkan perempuan, saya menyarankan perlunya dibangun sebuah sistem proteksi sosial yang disusun sedemikian rupa agar dapat melindungi perempuan pencari nafkah yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pengembang dan hal ini harus diuraikan dengan terperinci sebagai rencana aksi kerja *(action plan)*. Contohnya pemberian dana usaha sebagai ganti lahan yang tergusur, dengan dana yang berasal dari negara dan dari pengembang yang menggunakan sumber daya alam tersebut yang menyebabkan masyarakat tergusur. Pemberian dana pemberdayaan tersebut harus disertai dengan skema pendampingan usaha dan pemantauan yang ketat.

Penggunaan dana *corporate social responsibility* (CSR) seperti janji pemberian uang dan biaya umrah pada beberapa orang nelayan oleh pengembang, seperti dilansir oleh harian Tempo (Prasetiyo B & Parikesit G 2015) tentunya akan menimbulkan prasangka di antara nelayan. Dana seperti itu seharusnya dialokasikan pada pemulihan sumber pendapatan nelayan yang hilang. Begitu pula, relokasi pun sepatutnya dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang serupa. Nani misalnya mengatakan kepada saya bahwa ia merasa akan senang apabila mereka direlokasi ke pantai di daerah Banten yang masih sangat kaya akan ikan. Suara-suara para perempuan nelayan yang menanggung beban berlipat dari proyek reklamasi Teluk Jakarta ini, semoga dapat menjadi masukan pada proyek-proyek serupa di kemudian hari.

Penutup

Reklamasi Teluk Jakarta adalah bagian dari sistem kapitalisme modern yang didukung oleh para pemegang kekuasaan melalui kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan nelayan dan hanya berfokus pada keuntungan material semata. Di masa mendatang, hal ini akan semakin mempertajam jurang ketidaksetaraan bagi para perempuan nelayan yang implikasinya pada akar rumput yaitu lahirnya reproduksi kemiskinan terhadap perempuan. Di dua lokasi penelitian saya melihat proses pemiskinan dan marginalisasi para perempuan nelayan. Cerita-cerita ini masih meninggalkan banyak pertanyaan dalam hati saya.

Analogi reklamasi Teluk Jakarta bagi saya adalah sebuah mega proyek yang merupakan ejawantah cerita-cerita besar laki-laki dengan "yang terbesar" dan "terhebat" yang menggilas cerita-cerita kecil perempuan nelayan, tentang cita-cita mereka mengantarkan anak-anak mereka bersekolah, tentang cita-cita kehidupan masa depan yang sejahtera. Maka saya setuju kiranya

bahwa situasi perempuan nelayan adalah *subaltern*, yang ditulis Gayatri Spivak dalam artikelnya "Can the Subaltern Speak?" Esai Spivak tersebut menggambarkan situasi kelompok perempuan yang terlupakan, yang suaranya tidak terdengar dan tersubordinasi oleh kelompok- kelompok elit yang berkuasa. Dalam kasus perempuan nelayan yang terdampak oleh proyek reklamasi, suara para perempuan nelayan bahkan terkaburkan oleh kepentingan kaum elit dan pemegang kekuasaan yang mungkin saja mengambil keputusan berdasarkan kepentingan kelompok pemodal semata. S*ubaltern,* menurut Spivak selalu terjadi ketika terdapat kesenjangan yang semakin lebar antara dua kelompok, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin[2]. Perempuan miskin sering dilihat sebagai makhluk tidak berdaya, sehingga mereka seringkali dilupakan dalam perencanaan pembangunan.

Mengutip Carol Gilligan, dalam bukunya *In a Different Voice*, saya juga melihat metode Pemda DKI Jakarta yang menggunakan norma laki-laki sebagai norma manusia dan mengesampingkan suara-suara perempuan (Gilligan 2003, h. 76) dalam melihat perempuan nelayan yang terdampak oleh kebijakannya. Betapa tidak, selama lebih dari sepuluh tahun, pengambilalihan wilayah laut di Kamal Muara oleh pemerintah telah berlangsung. Belum terlihat upaya-upaya pemerintah yang cukup berarti dalam menyelamatkan dan mensubstitusikan sumber penghidupan mereka dan meskipun telah terjadi pemiskinan pada ribuan perempuan nelayan, suara-suara pembelaan masyarakat pun masih banyak yang lebih ditujukan pada pihak pemerintah. Meski sesungguhnya, mereka berpihak pada kepentingan kaum kapitalis dengan pernyataan-pernyataan bahwa reklamasi memang harus dilakukan demi membersihkan perairan yang tercemar, sementara pencemar-pencemar laut masih dibiarkan beroperasi, tanpa tindakan berarti. Maka saya teringat pada kalimat Gayatri Spivak mengenai kaum subaltern; "Tak ada orang tertindas yang bisa bicara. Apalagi ia perempuan, ia akan begitu saja dilupakan."

Daftar Pustaka

Arif, A 2014, "Tanggul Laut Jakarta, dari Fauzi Bowo, Hatta Rajasa, hingga Joko Widodo, diakses 29 Juni 2017, http://lifestyle.kompas.com/read/2014/10/15/1048029/Tanggul.Laut.Jakarta.dari.Fauzi.Bowo.Hatta.Rajasa.hingga.Joko.Widodo

Indonesia Investments n.d., "Goverment Development Plans of Indonesia", *Indonesia Investments*, diakses 26 September 2017, https://www.indonesia-investments.com/projects/government-development-plans/item305

Kiara 2015, "Nasib Perempuan Nelayan", Kiara, diakses 4 Desember 2016, https://www.kiara.or.id/nasib-perempuan-nelayan/

Kusnadi 2003, *Akar Kemiskinan Nelayan*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta.

Mosse, D 2010, "A Relational Approach to Durable Poverty, Inequality and Power", *The Journal of Development Studies*, vol. 46, no. 7, h. 1156-1178.

Prasetiyo B & Parikesit G 2015, "Reklamasi Jakarta Nelayan Diberi Amplop dan Dijanjikan Umrah", *Tempo*, diakses 26 September 2017, https://m.tempo.co/read/709962/reklamasi-jakarta-nelayan-diberi-amplop-dan-dijanjikan-umrah

Analisis Dampak Lingkungan Rencana Reklamasi Pulau G di Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta 2013, *Amdal Rencana Reklamasi Pulau G di Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta*, diakses 26 September 2017, http://www.jakarta.go.id/jakv1/application/public/download/bankdata/AMDAL_MWS.pdf

Saptari, R & Holzner, B 1997, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Saputra I 2016, "NJOP Jakarta Tinggi, Masyarakat Betawi Dipaksa Jual Tanah", *Jawa Pos*, *www.jawapos.com*, diakses 21 September 2017, https://www.jawapos.com/read/2016/07/16/39576/njop-jakarta-tinggi-masyarakat-betawi-dipaksa-jual-tanah

Tong, RP 2010, Feminist Thought, *Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, terj. AP Prabasmoro, Jalasutra, Yogyakarta.

Walby, S 1990, *Theorizing Patriarchy*, Wiley-Blackwell, London.

Young, IM 1990, *Justice and the Politics of Difference*, Princeton UP, Princeton, NJ.

Young, IM 2013, *Responsibility for Justice*, Oxford University Press, New York.

Catatan Belakang

1 Bagian ini merupakan petikan dari thesis saya mengenai strategi perempuan nelayan menghadapi penurunan pendapatan sebagai implikasi reklamasi Teluk Jakarta.

2 Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy dalam Membaca Gayatri Chakravorty Spivak, dalam artikel hasil wawancara mereka dengan Spivak ketika mengisi ceramah di Program Pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Jogyakarta dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 3 Juni 2009. Sumber bacaan adalah www.kunci.or.id.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
5. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
6. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

FORDFOUNDATION

Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia
ppni

1410 1533

Patung sampul depan: "Solidaritas" (Dolorosa Sinaga, 2000)